

# **Disfungsi United Nations Population Fund (UNFPA) dalam Mengatasi Gender Sex Selection di Tiongkok**

**Adeyaka Wury Aksani**  
Departemen Hubungan Internasional,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga  
Email: adeya.aksani@gmail.com

## *Abstract*

*United Nations Population and Fund is a United Nations agency that was established on 1969. This organization engaged in the field of population with three mandates; reproductive health, gender equality, and population and development strategies, which also aims to help countries that require assistance related to population problems. UNFPA has assisted China since 1979 when China began to implement a controversial population policy called one child policy. UNFPA's assistance to Tiongkok continued until 1991 when UNFPA has declared itself as the first international institution to raise the issue of gender inequality in this country. This problem was due to the one child policy exacerbates gender sex selection phenomenon that has long existed in the country. The main indication of gender sex selection is the gap in the number of sex ratio at birth (SRB) which is far from the normal rate. In this thesis, the dysfunction experienced by UNFPA is approached through the international dysfunctional organization theory. The material dimension is related to the weak political bureaucracy of UNFPA and the Tiongkok power conversion of the UNFPA. The cultural dimension is related to the UNFPA bureaucratic culture that does not comply with Tiongkok's society characteristics.*

**Keywords:** *UNFPA, gender sex selection, gender equality, international organization dysfunction, confucianism, patriarchy*

## *Abstrak*

*United Nation Population Fund (UNFPA) merupakan organisasi yang berada dibawah naungan PBB yang dibentuk pada tahun 1969. Organisasi ini bergerak di bidang kependudukan dengan tiga mandat yaitu kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, serta populasi dan strategi pembangunan, yang juga bertujuan untuk membantu negara-negara yang membutuhkan bantuan terkait dengan permasalahan kependudukan. UNFPA telah masuk di Tiongkok ini sejak tahun 1979 di mana pada tahun tersebut Tiongkok menerapkan kebijakan kependudukan yang kontroversial yakni one child policy. Bantuan UNFPA kepada negara ini terus berlanjut hingga pada tahun 1991 saat UNFPA mendeklarasikan diri sebagai lembaga internasional pertama yang mengangkat isu gender inequality di Tiongkok. Hal tersebut disebabkan karena one child policy memperparah fenomena gender sex selection yang sudah lama ada di negara tersebut. Indikasi terjadinya fenomena gender sex selection adalah timpangnya angka sex ratio at birth (SRB) yang mana sudah jauh dari angka normal. Pada penelitian ini disfungsi yang dialami oleh UNFPA dilihat melalui teori disfungsi organisasi internasional. Pada dimensi material terkait pada birokrasi politik UNFPA yang lemah dan konversi power negara Tiongkok pada UNFPA. Pada dimensi kultural terkait dengan kultur birokrasi UNFPA yang tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat Tiongkok*

**Kata Kunci:** *UNFPA, gender sex selection, kesetaraan gender, disfungsi dalam organisasi internasional, konfusianisme, patriarki*

United Nations Population Fund (UNFPA) merupakan salah satu organisasi internasional yang berada dibawah naungan PBB. UNFPA didirikan pada tahun 1969 dan bergerak dalam bidang populasi dan kependudukan. Tiga area kunci mandat UNFPA meliputi (1) kesehatan reproduksi, (2) kesetaraan gender, serta (3) populasi dan strategi pembangunan. Organisasi ini berdiri dengan tujuan untuk memberikan sebuah kondisi dimana setiap kehamilan diinginkan, setiap persalinan aman, dan potensi setiap orang muda terpenuhi. Mandat dari UNFPA adalah “delivers a world where every pregnancy is wanted, every birth is safe, every young person's potential is fulfilled.” Pada dasarnya UNFPA menyadari bahwa di negara berkembang yang merupakan tempat mayoritas aktifitas UNFPA dilakukan, ketimpangan gender masih banyak terjadi dimana masih ada kecenderungan untuk memberikan satu peluang yang lebih besar dari segi ekonomi, sosial, dan budaya untuk salah satu gender tertentu. Sehingga untuk mencapai tujuan dibentuknya organisasi ini, UNFPA memiliki beberapa mandat dengan mengusung nilai seperti kesetaraan gender.

Kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia. Tujuan keseluruhan dari kesetaraan gender adalah sebuah masyarakat dimana perempuan dan laki-laki Adanya preferensi dalam memilih jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan ini mencerminkan diskriminasi dalam praktik sosial-ekonomi dan juga tradisi. Pada negara tertentu, hanya anak laki-laki yang akan mewarisi properti, mereka juga diharapkan untuk merawat orang tuanya di masa tua, melakukan upacara pemakaman, serta membawa nama keluarga. Disisi lain, anak-anak perempuan dianggap menjadi sebuah beban, terutama jika diperlukan mahar yang mahal bagi mereka pada saat menikah nantinya. Tradisi tersebut kemudian memunculkan tendensi yang besar bagi wanita untuk memilih dan melahirkan anak laki-laki. Sex selective abortion khususnya telah menyebabkan krisis nasional di India dan Tiongkok.

Indikator dari adanya preferensi pemilihan jenis kelamin dapat diukur menggunakan Sex Ratio at Birth (SRB), yakni perbandingan jumlah anak laki-laki yang lahir dibandingkan dengan jumlah perempuan yang lahir pada periode tertentu. Rasio jenis kelamin biologis normal pada saat lahir dapat berkisar dari 102-106 laki-laki per 100 perempuan. Ketika jauh lebih banyak anak laki-laki yang lahir dibandingkan perempuan maka hal tersebut merupakan tandabahnya fenomena sex selection telah terjadi.

Sex selection merupakan upaya untuk mengontrol jenis kelamin anak untuk mencapai jenis kelamin yang diinginkan. Menurut UNFPA, alasan di balik pemilihan jenis kelamin disebabkan oleh tiga faktor dan hal tersebut dapat memberikan pemahaman untuk menjelaskan adanya ketidakseimbangan rasio jenis kelamin (SRB). Pertama preferensi untuk lebih memilih anak laki-laki karena adanya marginalisasi posisi sosial, ekonomi, dan simbolik pada perempuan dan wanita sehingga hanya menikmati hak yang sedikit dibandingkan laki-laki. Kedua, Perkembangan teknologi diagnosis prenatal yang memungkinkan orang tua untuk mengetahui jenis kelamin anak mereka yang belum lahir. Terakhir, kesuburan yang rendah yang kemudian meningkatkan kebutuhan untuk pemilihan jenis kelamin dengan mengurangi kemungkinan memiliki anak laki-laki di keluarga yang lebih kecil. Pada suatu negara tertentu, faktor pertama terlihat lebih menonjol sebagai salah satu alasan pemilihan jenis kelamin, di mana pemilihan jenis kelamin juga didasarkan atas gender yang berkaitan dengan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Sehingga gender sex selection disini tidak hanya memilih berdasarkan jenis kelamin saja tapi juga di dasarkan atas peran apa yang akan dibawa atau di dapatkan oleh calon anak nanti.

Tiongkok merupakan salah satu negara yang mendapatkan bantuan dari UNFPA sejak tahun 1979 untuk menangani

masalah kependudukannya. Seperti yang kita ketahui, Tiongkok merupakan negara dengan jumlah populasi tertinggi di dunia bahkan hingga saat ini. Data terakhir yang ada pada tahun 2014 milik World Bank, menunjukkan jumlah penduduk Tiongkok yang tercatat sebanyak 1.364 milyar..Banyaknya jumlah populasi di Tiongkok juga disertai dengan beragam masalah kependudukan serta fenomena seperti gender sex selection yang berujung pada sex selective abortion. Tidak ada data pasti yang menyebutkan kapan tepatnya fenomena gender sex selection dimulai di Tiongkok, namun diterapkannya kebijakan one child policy pada tahun 1980 dimungkinkan semakin memperparah fenomena tersebut. Kebijakan one child policy sendiri mulai dilembagakan pada tahun 1980, yang pada tahun tersebut sudah terdapat gap sebesar 3,2% antara populasi laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 1991 UNFPA mulai menjadi lembaga internasional pertama untuk mengangkat isu gender inequality di Tiongkok yang pada saat itu masih merupakan hal yang tabu untuk dibahas secara luas. Kemudian hal tersebut juga didukung Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) pada tahun 1994 dan dalam Program of Action yang berbunyi: “. . . eliminate all forms of discrimination against the girl child and the root causes of son preference, which result in harmful and unethical practices regarding female infanticide and prenatal sex selection.” Sex selection merupakan isu yang menjadi perhatian

UNFPA dan intervensi program tentang masalah ini didasarkan atas Programme of Action of the International Conference on Population and Development (ICPD) pada tahun 1994 dan UNFPA’s Strategic Plan tahun 2008-2013. Rencana strategis UNFPA didasarkan dari tiga pilar, yakni (1) penduduk untuk pembangunan, (2) kesehatan seksual dan reproduksi, serta (3) kesetaraan gender.

Namun pada kenyataannya, peran UNFPA sebagai lembaga internasional pertama yang mengangkat isu gender inequality di Tiongkok tidak memberikan banyak perubahan terhadap kondisi ketimpangan serta gap antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Bahkan pada tahun 2011 Tiongkok merupakan negara dengan rasio jenis kelamin paling tidak seimbang di dunia, dengan sex ratio birth sejumlah 117,78 (Golley t.t.). Atas fakta yang disertai dengan data-data tersebut, hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran UNFPA sebagai lembaga internasional pertama yang mengangkat isu gender inequality di Tiongkok tidak membawa perubahan yang mampu memperbaiki kondisi ketimpangan gender yang terjadi.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori disfungsi menurut Michael N. Barnett dan Martha Finnemore. Disfungsi pada organisasi internasional terletak pada dua dimensi yakni dimensi material dan kultural, dimana dimensi tersebut bersinggungan dengan kondisi internal dan eksternal dari suatu organisasi internasional (Barnett dan Finnemore 1999, 716)

**Tabel 1: Teori Disfungsi dalam Organisasi Internasional**

	Internal	Eksternal
Material	Bureaucratic politics	Realism/ neoliberal institutionalism
Cultural	Bureaucratic culture	World polity model

*Sumber: Barnett dan Finnemore, 1999*

Terdapat empat hal yang dapat membuat suatu organisasi internasional mengalami disfungsi. Pada dimensi material, organisasi internasional dihadapkan pada konversi power yang berasal dari aktor lain seperti negara. Namun tidak jarang dalam proses konversi tersebut, sebuah organisasi internasional mengalami disfungsi. Hal tersebut dapat terjadi karena dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Pada faktor internal, disfungsi bisa terjadi ketika power birokrasi politik organisasi internasional lemah ketika dihadapkan dengan lingkungan eksternalnya. Birokrasi sendiri dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau motif politik tertentu, namun sejatinya birokrasi dalam organisasi internasional juga memiliki kelemahan. Gallarotti menyebutnya sebagai pathologi dalam organisasi internasional. Setidaknya terdapat empat pathologi, yang pertama masalah dalam birokrasi adalah inefisiensi dan kurang responsif. Kedua, kerap membuat dan mengimplementasikan kebijakan yang kurang sesuai dengan logika rasional. Ketiga, organisasi terkadang berperilaku tidak wajar dalam menjalankan misinya. Keempat, organisasi kadang menolak permintaan dari pihak yang secara resmi ada dalam tanggung jawabnya (Gallarotti 1991 dalam Hennida 2015).

Sedangkan pada faktor eksternal, disfungsi terjadi ketika power negara lebih besar dibandingkan power organisasi internasional. Seringkali organisasi internasional dihadapkan pada kebijakan negara yang kontra dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Namun hal tersebut juga bukan suatu hal yang mengherankan mengingat bahwa negara memiliki pilihannya sendiri dalam menjalankan sebuah kebijakan. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwasannya tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan negara, ditambah dengan kenyataan bahwa

organisasi internasional tidak memiliki tangible power.

Dalam pandangan realis, kehadiran organisasi internasional sejatinya tidak begitu berpengaruh terhadap suatu permasalahan yang dihadapi negara sebab pemeran utama dalam menyelesaikan sebuah masalah tetaplah negara. Hal tersebut terjadi karena negara memiliki otoritas dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga seringkali visi dan misi sebuah organisasi internasional bertolak belakang dengan kebijakan yang ditetapkan oleh negara tersebut. Konversi power merupakan persyaratan yang harus dipatuhi bahwa organisasi internasional harus menerima sebuah konversi kekuasaan yang diakui oleh negara agar konversi kekuasaan tersebut memiliki dampak yang legal. Selain itu, organisasi internasional tidak bisa semata-mata mengintervensi isu dalam suatu negara tanpa adanya konversi power yang jelas.

Dalam hubungan antara negara dengan aktor non-negara, atau yang dalam hal ini merupakan organisasi internasional, sejatinya dibutuhkan konversi power yang dapat memberikan sedikit kuasa kepada organisasi internasional untuk mengintervensi kebijakan suatu negara dalam rangka menyelesaikan suatu isu di negara tersebut. Namun tentu saja hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah mengingat power merupakan sesuatu yang huge sehingga tidak bisa begitu saja dilimpahkan kepada aktor lain. Akan tetapi, tanpa adanya konversi power dari negara kepada organisasi internasional akan memperlambat bahkan mempersulit sebuah organisasi internasional untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi sebuah negara. Sehingga dalam hal ini otoritas terbesar tetap dipegang oleh negara, begitu pula dengan kebijakan yang diambil oleh negara yang membuat organisasi internasional tidak dapat berbuat banyak dalam menanggapi kebijakan yang telah diambil sebuah negara.

Pada proses kerjasama antara UNFPA dengan State Family Planning Commission tersebut, kepentingan UNFPA akan dihadapkan dengan kepentingan negara Tiongkok yang diwakili oleh State Family Planning Commission. Oleh karena itu, pada kondisi ini UNFPA menjalankan proses negosiasi dengan State Family Planning Commission agar kebijakan yang diimplementasikan oleh State Family Planning Commission dapat disesuaikan dengan tujuan UNFPA dalam misinya secara umum. Apabila kemudian UNFPA kalah dalam proses negosiasi, maka pada saat itulah UNFPA dikatakan mengalami disfungsi.

Berhasil atau tidaknya proses negosiasi tersebut tergantung dari bagaimana birokrasi politik dalam UNFPA memperjuangkan kepentingannya agar tujuannya dapat tercapai. Tujuan UNFPA secara umum adalah “delivering a world where every pregnancy is wanted, every childbirth is safe and every young person's potential is fulfilled”, yang dalam tujuan tersebut juga terdapat nilai-nilai yang bertujuan untuk menyetarakan gender. Sehingga menjadi tugas UNFPA untuk membentuk masyarakat dimana perempuan dan laki-laki menikmati hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam semua bidang kehidupan. Dengan demikian hadirnya UNFPA sebagai lembaga internasional pertama yang mengangkat isu ketimpangan gender di Tiongkok bertujuan untuk membantu menyelesaikan isu tersebut. Akan tetapi, lemahnya birokrasi UNFPA tidak mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah Tiongkok. Dalam kaitannya dengan isu gender sex selection, salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah legalnya aborsi yang membuat pasangan suami istri dapat mengaborsi janin apabila jenis kelamin janin tersebut tidak sesuai dengan keinginan, yang sebagian besar mengharapkan jenis kelamin laki-laki.

Dalam situs resminya secara jelas UNFPA mengungkapkan bahwa mereka tidak mempromosikan aborsi sebagai salah satu cara Family Planning, namun

apabila negara tersebut memang melegalkan aborsi maka UNFPA menganjurkan agar mempermudah akses aborsi yang aman. Akan tetapi, aborsi sendiri merupakan hal yang legal secara hukum di Tiongkok, yang telah melegalkan praktek aborsi sejak tahun 1950an. Namun hal tersebut tidak menjadi hal yang umum hingga pemerintah Tiongkok menerapkan kebijakan one child policy (Olesen 2011). Sehingga salah satu kebijakan Tiongkok yang tidak mampu dipengaruhi oleh UNFPA adalah kebijakan mengenai aborsi.

Dalam hal ini, tujuan UNFPA untuk menghapuskan fenomena gender sex selection terhambat oleh hukum yang diterapkan di Tiongkok, karena pada saat yang bersamaan, Tiongkok juga memiliki urgensi untuk mengurangi jumlah penduduknya yang mana hal tersebut merupakan kepentingan nasionalnya. Urgensi untuk mengurangi jumlah penduduk diimplementasikan dalam one child policy yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Tiongkok sejak tahun 1979 (Hesketh dan Xing 2015). Dalam penerapan kebijakan tersebut, pemerintah Tiongkok menggunakan aborsi sebagai salah satu sanksi yang diberikan kepada masyarakatnya yang melanggar kebijakan tersebut. Aborsi dapat dilakukan apabila terjadi kehamilan yang tidak direncanakan maupun kehamilan yang tidak dilaporkan. Dalam hukum pemerintah Tiongkok, aborsi paksa disebut dengan remedial measures, yakni konsekuensi yang harus dihadapi bagi penduduk Tiongkok yang tidak mentaati kebijakan yang telah dilegalkan oleh sistem hukum di Tiongkok (Li 1995). Digunakannya aborsi sebagai salah satu metode sanksi dalam penerapan one child policy tidak mungkin membuat Tiongkok secara hukum melarang praktek tersebut. Sehingga kebijakan yang seharusnya tidak dianjurkan oleh UNFPA justru menjadi kebijakan yang dilegalkan di Tiongkok.

Posisi UNFPA sebagai pendatang di Tiongkok dengan power yang tidak

sebesar yang dimiliki di Tiongkok membuat organisasi internasional tersebut memiliki kekuatan yang terbatas untuk memasukkan nilai-nilai yang dibawa tanpa adanya izin dari negara penerima. Hal tersebut dikarenakan UNFPA tidak memiliki pengaruh dan kewenangan untuk memaksakan, bahkan memilih dan menetapkan kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh Tiongkok. Barkin (2006) menyatakan bahwa perbedaan power yang dimiliki negara dengan power yang dimiliki organisasi internasional menyebabkan adanya *asymmetries of interdependence* yang diakibatkan oleh suatu kondisi dimana negara menjadi aktor utama yang mengimplementasi kebijakan sedangkan organisasi internasional menjadi aktor pendukung dari terwujudnya kebijakan tersebut. Lebih kuatnya power yang dimiliki oleh negara ini kemudian dapat menimbulkan penolakan untuk menerima anjuran kebijakan, transfer ilmu, prinsip dan norma, bahkan kehadiran dari organisasi internasional di negara tersebut.

Disisi lain, keefektifan sebuah organisasi internasional tergantung pada bagaimana kapasitas negara dalam mengaplikasikan peraturan, norma, dan prinsip yang dibawa oleh organisasi internasional. Hal tersebut terjadi karena dua hal, pertama karena negara memiliki keterbatasan kapasitas untuk menjalankan norma dan prinsip tersebut sehingga negara gagal dalam menerapkan prinsip dan norma asing tersebut dalam entitas lokal negaranya (Barkin 2006, 19). Kedua, negara tidak menerapkan prinsip dan norma dalam organisasi internasional dimana ia menjadi anggota karena pada dasarnya negara tersebut memang enggan untuk menerapkan norma dan prinsip tersebut sehingga bergabungnya negara dalam organisasi internasional hanya sebatas simbolik (Tallberg 2002, 611). Mengutip Stanley Fish, Potter (t.t.) menyatakan bahwa: "It suggest that local implementation of non-local rule regimes depends on the extent to which their underlying norms are received by local interpretative community."

Sehingga selective adaptation disini menjadi penentu dari bersedia atau tidaknya Tiongkok mengimplementasikan norma-norma asing pada komunitas lokal negara tersebut (Potter t.t., 714).

Pada kondisi dimana gender sex selection mulai terjadi, Tiongkok masih menjalankan one child policy, dan terus berlanjut hingga beberapa tahun kedepan. Apabila Tiongkok menghentikan one child policy untuk fokus dalam menyelesaikan fenomena gender sex selection, maka hal tersebut akan memiliki dampak pada skala internasional seperti terhambatnya tujuan pembangunan dunia dan tujuan dari konferensi populasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 1974. Disisi lain, one child policy merupakan kebijakan pengendalian populasi yang didasarkan atas kebutuhan negara tersebut. Dengan demikian urgensi Tiongkok untuk mengendalikan populasi penduduk melalui kebijakan one child policy lebih tinggi dibandingkan dengan penyelesaian fenomena gender sex selection yang dalam mengakhiri fenomena tersebut, Tiongkok harus mengorbankan sesuatu yang telah disetujui dalam konstitusi negaranya.

Tiongkok sendiri sejatinya merupakan negara yang menandatangani beberapa perjanjian mengenai hak asasi manusia yang seharusnya membuat negara tersebut menjadi patuh dan hormat terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi adanya fakta-fakta tersebut tidak bisa menjadi faktor pendukung bagi UNFPA untuk dapat memaksa Tiongkok menghapus metode aborsi karena metode tersebut juga masih digunakan dalam one child policy, baik sebagai bentuk penyelesaian maupun sebagai sanksi. Sehingga secara tidak langsung keberadaan one child policy menjadi faktor pendorong terjadinya fenomena gender sex selection karena mudahnya akses aborsi yang memang dilegalkan di Tiongkok demi kepentingan one child policy.

Faktor tersebutlah yang kemudian menyebabkan UNFPA mengalami disfungsi dalam dimensi material, dimana nilai-nilai yang dibawa oleh UNFPA tidak diserap oleh Tiongkok karena pemerintah Tiongkok memutuskan untuk lebih mementingkan kepentingannya untuk mengurangi populasi dengan menjalankan one child policy. Dalam hal ini organisasi internasional bukanlah pihak yang dapat disalahkan, namun kesalahan justru terletak pada negara (Barnett dan Finnemore 1999, 717). Pada kenyataannya, tidak semua negara mau bersikap sesuai dengan nilai dan norma yang dibawa oleh organisasi internasional. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kecenderungan sebuah negara untuk memilih dan memutuskan suatu hal yang menurutnya baik, dan mengabaikan saran yang dianjurkan oleh organisasi internasional. Apabila organisasi internasional memberikan bantuan hal tersebut merupakan salah satu pendukung dalam proses negara mencapai tujuannya, diluar hal tersebut pilihan dan keputusan mengenai kebijakan apa yang diambil tetap ada di tangan negara (Potter t.t., 714).

Disfungsi yang dialami oleh suatu organisasi internasional, selain diakibatkan oleh dimensi material juga disebabkan oleh dimensi kultural. Sama halnya seperti dimensi material, disfungsi pada dimensi kultural juga dapat disebabkan oleh dua faktor yakni eksternal dan internal. Meyer dan Rowan mengungkapkan bahwa pada faktor eksternal, disfungsi dapat terjadi apabila organisasi internasional lebih mementingkan legitimasi dibandingkan dengan efisiensi. Pada dimensi ini biasanya terdapat dirkursus internasional yang mempengaruhi logika pemikiran dari sebuah organisasi internasional sehingga kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan dari organisasi internasional tersebut.

Sedangkan pada faktor internal disfungsi pada organisasi internasional masih disebabkan oleh birokrasi. Namun

terdapat perbedaan di mana birokrasi yang dimaksud ialah kultur birokrasinya. Vaughan menyatakan bahwa Kultur birokrasi sendiri merupakan pola perilaku yang dibentuk dengan tujuan supaya kerja organisasi internasional lebih efisien. Namun terkadang kultur birokrasi ini membentuk sebuah generalisasi kerja yang tidak sesuai dengan karakteristik dan lingkungan kerja organisasi internasional.

Rutinitas birokrasi yang tidak sesuai dengan lingkungan ini pada akhirnya mampu menghancurkan perilaku dari organisasi internasional sehingga muncullah sebuah disfungsi. Lingkungan kerja organisasi internasional ini dapat dilihat melalui latar belakang dan karakteristik lapangan. Sehingga disfungsi pada faktor internal dapat terjadi apabila organisasi internasional bekerja mengikuti rutinitas yang telah dibentuk oleh kultur birokrasi tanpa mempertimbangan kondisi dan karakteristik lingkungan kerja.

Birokrasi dibentuk sebagai maksud yang rasional untuk mencapai tujuan kolektif dan meyebarakan nilai-nilai sosial tertentu. Barnett dan Finnemore (1999) menyatakan bahwa: "bureaucracies are created, propagated, and valued in modern society because of their supposed rationality and effectiveness in carrying out social tasks." Dengan demikian peraturan yang telah dibuat oleh sebuah organisasi internasional telah menjadi standar yang harus dipenuhi oleh aktor tempat organisasi tersebut beroperasi dalam rangka untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Peraturan yang dibentuk oleh organisasi internasional tentu saja telah disesuaikan dengan logika yang dimiliki, yang selanjutnya terbentuk menjadi generalisasi aturan. Generalisasi aturan ini kemudian diterapkan pada semua negara yang dibantu oleh organisasi internasional tersebut.

Dalam proses kerjanya, organisasi internasional akan berusaha

untuk memenuhi hal-hal yang terdapat dalam generalisasi aturan guna tercapainya kesuksesan program dari organisasi internasional tersebut. Namun berjalannya operasi organisasi internasional dengan generalisasi aturan terkadang menciptakan rutinitas yang dapat menyebabkan organisasi internasional menjadi tidak peka terhadap masalah yang ditimbulkan oleh rutinitas tersebut (Barnett dan Finnemore 1999, 718). Peraturan yang digeneralisasikan dapat membuat organisasi internasional menjadi tidak responsif terhadap lingkungannya, serta menjadi terobsesi dengan peraturan pada misi utama yang telah dibuat dan pada akhirnya menyebabkan perilaku yang tidak efisien di organisasi internasional tersebut (Barnett dan Finnemore 1999, 700).

Dalam melaksanakan program kerjanya, UNFPA bermitra dengan pemerintah bersama dengan badan-badan PBB lainnya, masyarakat, LSM,

yayasan, dan sektor swasta di Tiongkok. Kemitraan yang dilakukan oleh UNFPA terbagi dua tingkat, yakni pada tingkat kebijakan dan pada tingkat intervensi proyek. Pada tingkat kebijakan, UNFPA bertujuan untuk mencapai perubahan kebijakan yang positif di bidang kependudukan dan pembangunan, kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender melalui kerjasama dengan pembuat kebijakan di berbagai tingkatan melalui advokasi yang dibuktikan, dialog kebijakan dan dukungan penasihat teknis. Sedangkan pada tingkat intervensi proyek, UNFPA mendukung keputusan berdasarkan bukti keputusan melalui upaya penelitian, membantu mengembangkan dan melaksanakan kegiatan operasional yang bertujuan untuk membangun model yang dapat ditiru untuk meningkatkan pemerataan akses layanan oleh kelompok sasaran yang berbeda dari populasi, serta penyediaan jasa konsultasi teknis untuk membangun kapasitas kelembagaan.

**Tabel 2: Timeline of UNFPA's assistance in China**

Periods and goals	Highlights of achievements
<p><b>1979</b></p> <p>Signing of MOU and programme start-up</p>	<p>Led to the <b>formulation of the first Country Programme</b>, prior to which China received no assistance for population activities from any other multilateral, bilateral or NGOs.</p>
<p><b>Country Programme 1 (1980-1984)</b></p> <p>Goal: To assist Government of China in capacity building in population studies, improvements and provision of maternal and child care services</p>	<p><b>National Population and Housing Census:</b> assisted China to do its first modern census</p> <p><b>Maternal Health and Family Planning:</b> advanced care facilities and special training in 8 maternal and child hospitals first, and widely disseminated throughout China</p> <p><b>Demographic training and research:</b> Supported the training of around 200 demographers and public health specialists at masters and PhD levels; Assisted China to establish a national research institute</p> <p><b>Contraceptives:</b> Increased quality of contraceptives</p> <p><b>Population information, education and communication:</b> Creation of a modern professional publicity and education network of family planning programme</p>
<p><b>Country Programme 2 (1985-1989):</b></p> <p>Goal: To further strengthen the comprehensive national capacity in population data collection and analysis, and to assist Government of China to become self-reliant in the field of population</p>	<p><b>Maternal Health and Family Planning:</b> Focused 18 pilot maternal health/family planning institutions at different levels which led to decreasing of infant mortality rates. Strengthened maternal health and family planning curricula at medical colleges</p> <p><b>Contraceptives:</b> Continue to introduce modern and more effective contraceptives into China, improve manufacturing practices and establish standards for quality control.</p> <p><b>Data:</b> Supported the one per cent sample survey of China population in 1987 and assisted China to prepare its second modern census</p> <p><b>Special programmes on women:</b> Established revolving funds in enterprises in the northwest provinces to start income-generation programmes for women.</p>



	<p><b>Special programmes on ageing:</b> Started to work with China National Committee on Ageing (CNCA) on policy studies on ageing</p>
<p><b>Country Programme 3 (1990-1995):</b></p> <p>Goal: To assist Government of China to achieve its population and development objectives</p>	<p><b>Maternal Health and Family Planning:</b> at grass-roots level in poor and remote areas (305 counties): jointly carried out with UNICEF and supported by WHO. World Bank adopted the model of integrating family planning with MCH services and expanded it to 285 counties.</p> <p><b>Contraceptives:</b> Phased out the steel-ring IUD for the safer and more effective copper-T IUD</p> <p><b>South-south cooperation:</b> Advanced training programmes were utilized for south-south cooperation.</p>
<p><b>Interim Period (1996-1997)</b></p>	<p><b>UNFPA inter-regional project</b> to promote Chinese training facilities to countries in East and Southeast Asia;</p> <p><b>Negotiate with Government of China on Country Programme 4</b>, the first Country Programme after the International Conference on Population and Development in 1994</p>
<p><b>Country Programme 4 (1998-2002)</b></p> <p>Goal: Countr</p>	<p><b>Reproductive Health:</b> Shift from an administrative family planning approach to an integrated, client-oriented reproductive health approach; Targets and quotas were lifted in the 32 countries UNFPA assisted; Government of China incorporated aspects of the client-oriented, quality of care reproductive health approach in additional 827 counties</p> <p><b>Pilot project on Adolescent Reproductive Health</b> in Shanghai and Beijing: increased awareness of sexual and reproductive health issues and generated support from local stakeholders, inspired initiatives to provide reproductive health information and services to underserved groups, including youth, migrants and men.</p> <p><b>Capacity building:</b> A MIS system was established, and its use, especially in generating relevant data for monitoring was increased.</p>
<p><b>Country Programme 5 (2003-2005)</b></p> <p>Goal: To assist the Government of China in implementing the International Conference on Populaton and Development Programme of Action (ICPD PoA)</p>	<p><b>Reproductive Health:</b> evidence-based advocacy led to the removal of birth-spacing in many UNFPA-supported counties and throughout Hainan province; Quality of care principles being promoted</p> <p><b>HIV prevention:</b> UNFPA introduced a multisectoral approach to HIV prevention. Through supporting China Youth Network, young people participated in HIV prevention efforts.</p> <p><b>Gender:</b> raised awareness of sex ratio imbalance and the critical need for sex-disaggregated data.</p> <p><b>Ageing:</b> Results generated from ageing studies with UNFPA support were presented at the consultation meeting for drafting the 11<sup>th</sup> 5-year Development Plan on Ageing in 2005.</p> <p><b>South-south:</b> three centers of excellence continued to carry out high-quality international training for Asia and Africa.</p>
<p><b>Country Programme 6 (2006-2010)</b></p> <p>Goal: to assist the Government of China in implementing the International Conference on Populaton and Development Programme of Action (ICPD PoA)</p>	<p><b>Reproductive Health:</b> The quality of care reproductive health approach which began in Country Programme 4 were extended to more than 800 of China's 2859 counties. Concepts on reproductive rights, informed choice, integrated services, clients-centered were emphasized to the community and service providers.</p> <p><b>Youth Sexual and Reproductive Health:</b> 1). continued to support China Youth Network 2). to design and test youth friendly health promotion models for youth migrants in 4 cities (under UN Joint Programmes supported by Spanish MDG Fund)</p> <p><b>HIV/AIDS:</b> Supporting Chinese partners to be more effective in HIV prevention for high risk groups, including youth, migrants and female sex workers and general population as part of first UN joint programme on HIV/AIDS</p> <p><b>Gender:</b> 1).work with All China Women's Federation on campaigns on VAW, sex ratio at birth and male involvement 2). Worked with MOH and Anti Domestic Violence Network (NGO) on VAW under UN joint programme</p> <p><b>Data for Development:</b> Supported national capacity in generating and utilization of sex-disaggregated data and the monitoring of the implementation of the National Development Plan on Women and Children</p> <p><b>Urbanization and migration:</b>Started to support national partners to explore policy options for healthy urbanization in the context of massive domestic migration to ensure equitable access to essential social services</p> <p><b>Ageing:</b> Since 2006, UNFPA has been actively involved in the revision process of the Law of People's Republic of China on the Protection of Rights and Interests of</p>

	<p>the Aged. UNFPA also launched its first pilot project on ageing in 6 pilot counties to explore models leading to healthy and active ageing.</p> <p><b>Culture:</b> support the development of culturally appropriate maternal and child health services among ethnic minorities in 6 counties under UN Joint Programmes supported by Spanish MDG Fund</p> <p><b>Emergency response:</b> Provision of emergency reproductive health kits in emergency responses and capacity building of national partners in reproductive health and psychosocial support</p>
<p><b>Country Programme 7 (2011-2015):</b></p> <p>Goal: to continue to assist China in implementing the International Conference on Population and Development Programme of Action (ICPD PoA)</p>	<p><b>Reproductive Health Policy Advocacy:</b> Continued policy advocacy efforts leading to universal access to reproductive health; Advocate for comprehensive policy responses in the context of complex population dynamics; Advocate for inclusion of reproductive health in national emergency response plans; Supported the development of culturally appropriate maternal and child health services among ethnic minorities</p> <p><b>Youth Sexual and Reproductive Health:</b> Continue to advocate for youth-friendly services and comprehensive sexuality education for young people; Promote youth participation and leadership</p> <p><b>HIV/AIDS:</b> Strengthen HIV prevention and integrated reproductive health service among high risk groups, including youth, migrants and female sex workers</p> <p><b>Data for Development:</b> Continue to support national capacity in generating reliable and disaggregated data to support evidence-based development policies</p> <p><b>Urbanization and migration:</b> Continue to support national partners to explore policy options and pilot models at cities of varying development levels for a healthy urbanization in China through ensuring equitable access to essential social services</p> <p><b>Ageing:</b> Continue to improve the capacity of national partners to coordinate and manage the implementation of the national 12th Five-Year Plan on ageing, and to advocate for policy development of families coping with ageing in China</p> <p><b>Gender:</b> 1). Support policy advocacy and community-based intervention to address sex ratio at birth imbalance 2). Continue to work on policy advocacy and multi-sectoral responses to gender-based violence</p>

*Sumber: UNFPA China, <http://www.unfpa.cn/en/page/unfpa-china>*

Melalui ketujuh Country Program UNFPA di Tiongkok, dapat diambil kesimpulan bahwa bantuan yang diberikan UNFPA dalam menangani gender sex section di negara tersebut hanya sebatas pada aktifitas kampanye dan advokasi, tanpa adanya larangan maupun perubahan kebijakan tertentu. Aktifitas yang dilakukan UNFPA tersebut tentu saja telah disesuaikan dengan standar operasi organisasi tersebut, namun sayangnya bantuan yang diberikan UNFPA kepada Tiongkok tidak disesuaikan dengan kondisi budaya di negara tersebut. Hal tersebutlah yang kemudian membuat UNFPA mengalami disfungsi karena organisasi ini membuat kebijakan yang mudah diaplikasikan namun tidak disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Kebijakan mengenai aborsi yang diterapkan oleh Tiongkok tidak akan berubah hanya melalui advokasi dan bantuan dalam implementasi ICPD. Selama tidak ada perubahan peraturan

mengenai aborsi di Tiongkok dalam implementasi kebijakan one child policy tentu saja gender sex selection tidak akan hilang, sebab kebijakan ini merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya fenomena tersebut. Dalam web resmi UNFPA Tiongkok disebutkan bahwa “UNFPA advocates for policies and programmes that address the distorted sex ratio at birth.” Dengan demikian UNFPA mengalami disfungsi karena generalisasi aturan yang dibuatnya menyebabkan organisasi ini menjadi tidak responsif terhadap dampak sosial sehingga UNFPA tetap menjalankan rutinitas yang dianggapnya cukup untuk menangani permasalahan gender sex selection.

UNFPA bekerja di lebih dari 150 negara dan wilayah. Beragam wilayah lingkungan kerja UNFPA tentu saja memerlukan program kerja dan penanganan yang berbeda yang harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah-wilayah tertentu. Karakteristik

disini dapat dilihat melalui budaya maupun sistem yang dianut oleh masyarakatnya. Penyesuaian karakteristik wilayah dengan program kerja tentu saja akan memudahkan suatu organisasi internasional untuk penyelesaian sebuah isu. Namun sebaliknya, apabila program kerja diterapkan dengan cara menggeneralisasi maka akan memungkinkan munculnya disfungsi karena pertentangan antara program kerja dan karakteristik di wilayah tertentu. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab disfungsi UNFPA dalam menangani isu gender sex selection di Tiongkok.

Dalam hal ini, penulis melihat ada tiga poin utama yang menjadikan Tiongkok memiliki kondisi tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Pertama, Tiongkok merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar di dunia sehingga urgensi negara untuk mengurangi jumlah populasi juga berpengaruh dalam kebijakan yang diambil UNFPA. Kedua, Tiongkok menerapkan kebijakan one child policy, yang mana hal ini berkaitan dengan jumlah populasi negara yang ingin dikurangi dengan cara mengendalikan kelahiran. Ketiga, masyarakat Tiongkok menganut konfusianisme dan sistem kekerabatan patriarki sehingga cenderung memilih dan lebih menyukai anak laki-laki (son preference).

Menurut 2011 World Population Data Sheet (t.t.) saat UNFPA mendeklarasikan posisinya sebagai organisasi internasional pertama yang mengangkat isu gender sex selection di Tiongkok, negara tersebut tengah memiliki jumlah penduduk sebesar 1,346 juta pada tahun 2011. Jumlah tersebut menduduki peringkat pertama dalam daftar negara dengan populasi terbesar di dunia. Bahkan jauh sebelum UNFPA mendeklarasikan diri sebagai organisasi internasional pertama yang mengangkat isu gender sex selection di Tiongkok, UNFPA sendiri juga membantu Tiongkok dalam mengatasi isu populasi dengan cara membantu pemerintah

dalam menjalankan kebijakan one child policy. Kebijakan one child policy sendiri merupakan kebijakan yang hanya memperbolehkan memiliki satu orang anak di dalam satu keluarga. Adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat Tiongkok yang menganut konfusianisme dengan sistem kekerabatan patriarki cenderung memilih untuk memiliki anak laki-laki.

Dengan kondisi yang hanya diperbolehkan memiliki satu orang anak, tentu saja masyarakat Tiongkok akan memilih untuk memiliki putra yang karena dalam sistem kekerabatan patriarki lebih menguntungkan dan berposisi lebih tinggi dalam sistem sosial dibandingkan dengan anak perempuan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Chan dan Yip (2002), yakni: "In China, the issue of gender preference was complicated by the introduction of the One Child Policy to control the population...When the couples can have only one child, most of them will naturally desire for a son."

Anak laki-laki dianggap lebih penting karena mereka memiliki peran untuk menjaga properti yang telah dimiliki, mewarisi tanah, dianggap lebih banyak memiliki kesempatan untuk maju dibandingkan dengan anak perempuan, bertugas merawat orang tua di hari tua, dan melakukan tugas seremonial yang penting ketika orang tua meninggal (Hays t.t.). Hal tersebut menyebabkan pandangan pada kalangan orang tua bahwa memiliki anak laki-laki merupakan investasi ketika telah pensiun nanti. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada jaminan sosial yang universal di Tiongkok. Ditambah lagi banyak orang di Tiongkok pedesaan yang tidak memiliki jaminan pensiun. Melalui kutipan salah satu penduduk pedesaan Guangdong bernama Zhen Anban dalam Eckholm (2002), menyatakan: "people around here depend on their sons to provide for them in old age because you can't rely on anyone else." Sehingga dari anak laki-laki-lah mereka menggantungkan nasib di hari tua.

Melalui fakta yang telah dijabarkan, diketahui kondisi Tiongkok sebagai negara yang menganut sistem patriarki dan memegang nilai-nilai konfusianisme yang kuat karena telah mengakar selama berabad-abad. Hal tersebut pada akhirnya juga memiliki dampak sosial terutama pada masalah yakni adanya gender sex selection. Mandat UNFPA sebagai lembaga yang menangani masalah kependudukan dan populasi juga mencakup reproduksi yang terkait kesejahteraan manusia. Dengan mandat tersebut bisa dikatakan UNFPA merupakan lembaga yang menangani hal-hal paling intim dari eksistensi manusia seperti reproduksi, gender, seksualitas, dan isu-isu populasi terkait (Karam t.t, 434). Hal tersebut tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tantangan budaya yang mungkin masih dianggap tabu, sosial, dan ekonomi.

Oleh sebab itu kemudian dalam menjalankan misinya UNFPA juga harus bekerjasama dengan faith-based organization (FBOs) yang terintegrasi dengan budaya setempat. UNFPA sendiri mendefinisikan budaya sebagai dinamika yang pada pengaruh dan dampaknya dikaitkan dengan pola pikir, kepercayaan, dan perilaku yang menjadi kunci dari pembangunan. Perubahan sikap, perilaku, dan hukum yang terutama berkaitan dengan gender dan kesehatan reproduksi merupakan tugas jangka panjang yang cukup sulit dan menantang sebab mengubah pola pikir lebih sulit dibandingkan dengan memberikan layanan. Dalam proses pelaksanaan program, dibutuhkan pemahaman pada setiap dinamika budaya pada masyarakat di mana UNFPA bekerja, serta menantang nilai-nilai budaya, asset, ekspresi, dan kekuasaan struktur (Karam t.t., 435). Dengan demikian sudah seharusnya UNFPA bekerja dengan FBOs, masyarakat adat, dan struktur berbasis masyarakat lainnya sebagai mitra dalam pembangunan dan hak asasi manusia.

Dengan demikian disfungsi pertama yang dialami oleh UNFPA disebabkan oleh dimensi material pada

faktor internal yakni terkait dengan birokrasi politik. Lemahnya birokrasi politik UNFPA, membuat organisasi ini tidak memiliki posisi yang kuat dalam tawar-menawar kebijakan dengan pemerintah Tiongkok. Selain itu tidak adanya kemampuan UNFPA untuk membuat negara patuh juga menjadi salah satu kelemahan organisasi ini. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya enforcement approach sehingga Tiongkok tidak merasakan adanya sebuah desakan untuk mematuhi peraturan maupun kebijakan yang dibawa atau ditawarkan oleh UNFPA. Dalam hal ini, UNFPA tidak mampu memaksa Tiongkok untuk melarang aborsi yang menjadi salah satu pemicu munculnya fenomena gender sex selection.

Tidak mampunya UNFPA memaksa Tiongkok untuk menuruti kebijakan pilihannya sejatinya dilatarbelakangi karena tidak adanya konversi power yang jelas. Tiongkok merupakan negara yang kuat dan berkuasa, sehingga dibutuhkan pula kekuatan yang setidaknya memadai untuk mampu membuat Tiongkok mematuhi dan menuruti kebijakan yang dianjurkan oleh UNFPA. Namun pada kenyataannya, power UNFPA tidak mampu menandingi Tiongkok dan membuat negara tersebut merubah kebijakannya. Kebijakan yang dimaksud disini terkait dengan aturan aborsi yang dilegalkan di negara tersebut. Hal tersebut terjadi karena aborsi juga merupakan salah satu metode yang digunakan sebagai sanksi dari penerapan kebijakan one child policy.

Kehadiran organisasi internasional sejatinya tidak begitu berpengaruh terhadap suatu permasalahan yang dihadapi negara sebab pemeran utama dalam menyelesaikan sebuah masalah tetaplah negara. Hal tersebut terjadi karena negara memiliki otoritas dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga seringkali visi dan misi sebuah organisasi internasional bertolak belakang dengan kebijakan yang ditetapkan oleh negara

tersebut. Konversi power merupakan persyaratan yang harus dipatuhi bahwa organisasi internasional harus menerima sebuah konversi kekuasaan yang diakui oleh negara agar konversi kekuasaan tersebut memiliki dampak yang legal. Selain itu, organisasi internasional tidak bisa semata-mata mengintervensi isu dalam suatu negara tanpa adanya konversi power yang jelas. Hal tersebutlah yang kemudian membuat UNFPA mengalami disfungsi pada dimensi material di faktor eksternal.

Selain dimensi material, disfungsi dalam organisasi internasional juga disebabkan oleh dimensi kultural. Pada dimensi ini faktor internal lah yang menjadi penyebab UNFPA mengalami disfungsi. Faktor internal disini terkait dengan kultur birokrasi yakni sebuah rutinitas kerja yang telah terbentuk dalam UNFPA. Rutinitas kerja tersebut membuat UNFPA menjadi tidak responsif terhadap dampak-dampak lain yang muncul, sebab UNFPA menilai bahwa kinerjanya telah sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Seperti yang telah disebutkan, dalam rangka menyelesaikan permasalahan gender sex selection dibutuhkan perubahan aturan mengenai aborsi yang terkait dengan kebijakan one child policy.

Namun pada kenyataannya, di tahun awal UNFPA mendeklarasikan diri sebagai lembaga internasional pertama di Tiongkok yang memperhatikan isu kesetaraan gender, organisasi ini masih menjalankan program kerja yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk karena masih terkait dengan program kerja yang disesuaikan dengan misi awal kedatangannya. Program kerja tersebut kemudian menghadirkan permasalahan baru seperti timpangnya SRB karena adanya gender sex selection. Setelah program kerja yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk dihentikan, UNFPA beralih pada aktifitas kampanye dan advokasi untuk fokus pada penyelesaian masalah gender sex selection. Hal tersebut tercantum pada Country Program UNFPA yang pada Country Program pertama hingga

ketujuh hanya membuat kebijakan yang sesuai dengan standar operasinya saja. Namun UNFPA tidak memperhatikan lingkungan kerjanya yang dalam hal ini menganut sistem patriarki dan memegang nilai-nilai konfusianisme. Hal tersebut kemudian membuat UNFPA menjadi tidak responsif dalam menangani isu yang dihadapinya.

Pada tatanan sistem patriarki laki-laki diposisikan lebih unggul dibandingkan perempuan karena asas kepemilikan. Hal tersebut ditengarai juga berasal dari nilai-nilai konfusianisme yang menganggap anak laki-laki lebih penting karena mereka memiliki peran untuk menjaga properti yang telah dimiliki, mewarisi tanah, dianggap lebih banyak memiliki kesempatan untuk maju dibandingkan dengan anak perempuan. Preferensi untuk lebih memilih anak laki-laki juga terikat dalam keyakinan konfusianisme yang mana memerlukan laki-laki sebagai ahli waris sebagai penerus nama keluarga dan mengurus roh keluarga sesuai dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat Tiongkok. Kondisi yang seperti demikian diperparah dengan kebijakan one child policy yang merupakan kebijakan yang hanya memperbolehkan memiliki satu orang anak di dalam satu keluarga. Dengan kondisi yang hanya diperbolehkan memiliki satu orang anak, tentu saja masyarakat Tiongkok akan memilih untuk memiliki putra yang karena dalam sistem kekerabatan patriarki lebih menguntungkan dan berposisi lebih tinggi dalam sistem sosial dibandingkan dengan anak perempuan

Melihat kondisi tersebut UNFPA seharusnya mengajak faith-based organization (FBOs) untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal tersebut dilatarbelakangi karena isu yang ditangani oleh UNFPA merupakan isu yang sensitif karena bersinggungan dengan kebudayaan, kepercayaan, serta sistem yang telah dianut oleh Tiongkok. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan FBOs untuk membantu dalam perubahan sikap,

perilaku, dan hukum yang telah mengakar dalam sebuah masyarakat melalui sebuah lensa kebudayaan. Tidak adanya kerjasama dengan FBOs membuat organisasi ini kemudian

mengalami disfungsi sebab mengalami kesulitan dalam memasuki kebudayaan Tiongkok yang turut berperan besar dalam isu yang ditangani oleh UNFPA.

## Daftar Pustaka

- Buku
- [1] Barkin, J. Samuel. *International Organizations: Theories and Institution*. New York: Palgrave Macmillan, 2006
- [2] Barnett, Michael N dan Martha Finnemore. *The Politics, Power and Pathologies of International Organization*. The MIT Press, 1999
- [3] Hennida, Citra. *Rezim dan Organisasi Internasional*. Malang: Intrans Publishing, 2015
- Jurnal
- [4] Chan, Cecilia, Paul S. F. Yip, et. all, "Gender Selection in China: Its Meaning and Implications", *Journal of Assisted Reproduction and Genetics*, Volume 19, No. 9, 2002. Hong Kong: Plenum Publishing Corporation
- [5] Golley, Jane, Rod Tyers. "Gender 'Rebalancing' in China". *Asian Population Studies*, 2014  
[www.sciencedaily.com/releases/2014/06/14/0618071739.htm](http://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/14/0618071739.htm) (diakses pada 12 Juni 2016)
- [6] Hesketh, Therese dan Zhu Wei Xing. "The Effect of China's One-Child Family Policy after 25 Years". *The New England Journal of Medicine*, 2015  
<http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp13051833#t=article> (diakses pada 19 September 2016)
- [7] Karam, Azza. "The United Nations Population Fund's (UNFPA's) Legacy of Engaging Faith-Based Organizations as Cultural Agents of Change", *Religion and The United Nations*, Vol. 60, No.3,  
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1939-3881.2010.00141.x/full> (diakses pada 25 Oktober 2016)
- [8] Li, Jiali. "China's One-Child Policy: How and How Well Has it Worked? A Case Study of Hebei Province 1979-1988", <http://www.jstor.org/stable/2137750?origin=JSTOR-pdf>, 1995 (diakses pada 1 Oktober 2016)
- [9] Potter, Pitman B. (a) "China and the International Legal System: Challenges of Participation", *The China Quarterly*, Volume 191,  
<https://www.cambridge.org/core/journals/china-quarterly/article/china-and-the-international-legal-system-challenges-of-participation/8BBC875122AFEE5EFFF80A6B91AEC44A> (diakses pada 8 Oktober 2016)
- [10] Potter, Pitman B. (b) "Selective Adaptation and Institutional Capacity: Perspectives on Human Rights in China", *International Journal* Vol. 61, No. 2,  
<https://www.questia.com/library/journal/1P3-1079325811/selective-adaptation-and-institutional-capacity-perspectives> (diakses pada 8 Oktober 2016)
- [11] Tallberg, Jonas. "Paths to Compliance: Enforcement, Management, and the European Union International Organization" Vol. 56, No. 3 (Summer, 2002)  
Official Report
- [12] Population Reference Bureau, "2011 World Population Data Sheet", United States Agency International Development,  
[http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet\\_eng.pdf](http://www.prb.org/pdf11/2011population-data-sheet_eng.pdf) (diakses pada 25 Agustus 2016)
- [13] World Health Organization, "Preventing gender-biased sex selection: an interagency statement OHCHR, UNFPA, UNICEF, UN Women and WHO". WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 2011  
Media Online
- [14] Eckholm, Erik. "Desire for Sons Drives Us of Prenatal Scans in China", *The New York Times*, 21 Juni 2002,  
<http://www.nytimes.com/2002/06/21/international/asia/21CHIN.html?pagewanted=all> (diakses pada 25 Agustus 2016)
- [15] Olesen, Alexa. "China's abortion numbers grow", *The Washington Times*, 13 Juli 2011,  
<http://www.washingtontimes.com/news/2011/jan/13/chinas-abortion-numbers-grow/> (diakses pada 24 Juni 2016)
- [16] Website Resmi dan Sumber Internet Lainnya
- [17] All Girls Allowed, "History of The One-Child Policy", All Girls Allowed,  
<http://www.allgirlsallowed.org/one-child-policy> (diakses pada 20 Oktober 2015)
- [18] United Nation Population Fund, "Causes and Consequences", UNFPA,  
<http://www.unfpa.org/gender-biased-sex-selection> (diakses pada 26 Mei 2016)
- [19] United Nation Population Fund, "Frequently Asked Question About Gender Equality", UNFPA,  
<http://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality> (diakses pada 26 Mei 2016)
- [20] United Nation Population Fund, "UNFPA First Agency to Campaign against Sex Selection in China", UNFPA,  
<https://www.unfpa.org/sites/default/files/res>

- ource-pdf/sexselectn\_china.pdf (diakses pada 9 Juni 2016)
- [21] United Nations Population Fund, “How We Work”, UNFPA, <http://www.unfpa.org/how-we-work> (diakses pada 24 Agustus 2016)
- [22] UNFPA China, Timeline of UNFPA’s Assistance in China, <http://www.unfpa.cn/en/node/273> (diakses pada 25 Oktober 2016)
- [23] World Bank, “China”, The World Bank Group, <http://data.worldbank.org/country/china> (diakses pada 26 Mei 2016).